

Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)

Anggia Aliffiola Aviva Larasati ¹⁾, Amirul Mustofa ²⁾, Aris Sunarya ³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: anggialiffiola3@gmail.com

ABSTRAK

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program *capacity building* bagi badan usaha. PNM Membina Ekonomi Rumah Sejahtera (PNM Mekar) adalah layanan permodalan kolektif bagi perempuan pengusaha mikro prasejahtera dalam rangka pengembangan usaha. Pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman bagi perempuan kurang mampu sebagai pengusaha mikro melalui Program Bantuan Ekonomi Keluarga Sejahtera. PNM Mekar ditopang oleh kegiatan penunjang usaha dan dilaksanakan secara berkelompok. Dalam penyediaan modal dana korporasi, PNM Mekar menggunakan sistem kredit angsuran 50 minggu, guna menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi nasabah untuk melunasi pinjaman korporasi. Selain itu, saat pelunasan pinjaman usaha diberikan dengan sistem “kewajiban bersama”, dimana jika salah satu anggota tim tidak mampu membayar maka menjadi tanggung jawab kelompok. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai motor penggerak sektor UMKM dan koperasi, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan praktik-praktik terbaik dari sebuah perseroan terbatas dengan komitmen sejati untuk keberlanjutan, kemandirian, dan martabat yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program PNM Mekar pada masyarakat di Desa Darmokali dan untuk mengevaluasi dampak kebijakan program PNM Mekar terhadap pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di Desa Darmokali. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Mekanisme kerja PNM Mekar dalam memberikan bantuan permodalan ditujukan untuk ibu-ibu prasejahtera yang kurang mampu untuk dididik dalam memberikan pelatihan melalui pengelolaan usaha sehingga dapat membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatan dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri. Kebijakan PNM Mekar terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dikarenakan banyak nasabah yang terbantu dengan adanya bantuan permodalan ini mulai dari peningkatan pendapatan maupun perkembangan usaha yang mereka miliki.

Kata Kunci: Pendapatan, Kesejahteraan Masyarakat, PNM Mekar

Abstract

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM is here as a solution to increase welfare through access to capital, mentoring and capacity building programs for business entities. PNM Fostering a Prosperous Home Economy (PNM Mekar) is a collective capital service for underprivileged micro-entrepreneurs in the context of business development. In 2016, PNM launched a loan service for underprivileged women as micro-entrepreneurs through the Prosperous Family Economic Assistance Program. PNM Mekar is supported by business support activities and is carried out in groups. In providing capital for corporate funds, PNM Mekar uses a 50-week installment credit system, in order to create favorable conditions for customers to pay off corporate loans. Apart from that, business loan repayment is provided using a "joint obligation" system, where if one team member is unable to pay, it becomes the group's responsibility. This also shows that in carrying out its main function as a driving force for the MSME and cooperative sectors, PNM applies the principles of accountability and best practices of a limited liability company with a true commitment to sustainability, independence and greater dignity. This research aims to describe the implementation of the PNM Mekar program in the community in Darmokali Village and to evaluate the impact of PNM Mekar program policies on the income and welfare of the community in Darmokali Village. The data collection methods used were interviews, observation and documentation studies. PNM Mekar's working mechanism in providing capital assistance is aimed at underprivileged mothers who are less

fortunate to be educated in providing training through business management so that they can help customers increase their income and are given capital so that they can grow to create businesses independently. PNM Mekar's policy towards community income and welfare has been running well, because many customers have been helped by this capital assistance, starting from increasing income and developing the businesses they own.

Keywords: *Income, Community Welfare, PNM Mekar*

A. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, hingga rumah (Moi, 2013).

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM telah hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program *capacity building* bagi badan usaha. PNM Membina Ekonomi Rumah Sejahtera (PNM Mekar) adalah layanan permodalan kolektif bagi perempuan pengusaha mikro prasejahtera. Dalam rangka pengembangan usaha, pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman bagi perempuan kurang mampu sebagai pengusaha mikro melalui Program Bantuan Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar). PNM Mekar ditopang oleh kegiatan penunjang usaha dan dilaksanakan secara berkelompok.

PNM Mekar Jawa Timur didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan akses terhadap sumber daya permodalan dan peningkatan kapasitas bagi

usaha mikro, usaha kecil menengah dan koperasi (UMKM dan koperasi).

Sejak tahun 2009, PNM melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan menggandeng pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai motor penggerak sektor UMKM dan koperasi. PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan praktik-praktik terbaik dari sebuah perseroan terbatas dengan komitmen komitmen sejati untuk keberlanjutan, kemandirian, dan martabat yang lebih besar untuk negara (Mardiana, 2019). Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaannya. Sejak tahun 2009, PNM telah mendapatkan kepercayaan dari perbankan dan sejak tahun 2012 PNM juga berhasil menghimpun modal dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

Dalam hal ini, PNM telah memperluas cabangnya di Kota Surabaya sehingga mampu mendapatkan nasabah hingga 6.201 nasabah. Ini menunjukkan program PNM Mekar yang dikeluarkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Surabaya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan memberikan modal kerja UMKM. Namun, karena akses mereka yang terbatas ke modal kerja, keterampilan kewirausahaan mereka kurang dimanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses antara lain keterbatasan prosedur, ukuran perusahaan, dan kurangnya agunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PNM Mekar menerapkan sistem kelompok “tanggung jawab bersama” untuk menutup kesenjangan akses keuangan. Dengan begitu, diharapkan klien dapat mengembangkan usahanya untuk mencapai cita-citanya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam

penyediaan modal dana korporasi, PT PNM Mekar menggunakan sistem kredit angsuran 50 minggu guna menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi nasabah untuk melunasi pinjaman korporasi. Selain itu, saat pelunasan pinjaman usaha diberikan dengan sistem kewajiban bersama. Dimana jika salah satu anggota tim tidak mampu membayar, maka menjadi tanggung jawab kelompok.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada teori yang diambil dan variabel yang digunakan. Dapat dilihat dari hasil hipotesis penelitian terdahulu yang terbukti signifikan dengan bantuan program PNM Mekar. Namun penelitian tersebut tidak ada pembahasan mengenai kebijakan program PNM Mekar sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk perencanaan, arah, dan tindakan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Menurut Anderson (1979), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu *actor* atau sejumlah *actor* dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Leo Agustino (2006) adalah suatu hubungan yang terjadi di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut terlalu luas. Terlebih untuk dipahami, sebab apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup banyak hal.

Pengertian kebijakan publik secara luas menurut Roberty Eyestone (1971: 18)

dapat dikatakan sebagai hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal.

2. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Siagian (2014), evaluasi itu sendiri adalah suatu proses dalam kebijakan publik yang berguna untuk menilai sejauh mana efektivitas dan produktifitas dari sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kebijakan menekankan pada apa yang dilakukan aktor kebijakan. Anderson (dalam Budi Winarno, 2004:19-20), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*outcomers*).

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penilaian atau evaluasi kebijakan termasuk konten, implementasi, dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada bagian akhir tetapi untuk keseluruhan proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah penilaian memiliki arti yang saling terkait, yang masing-masing mengacu pada penerapan beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Penilaian meliputi menyimpulkan, mengklarifikasi, mengkritik, menyesuaikan, dan mereformasi masalah.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menjelaskan pengertian

UMKM sebagaimana didefinisikan menurut jenis usahanya, yaitu:

a) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau rumah tangga usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditentukan oleh undang-undang. Suatu badan usaha dapat dikatakan UMKM jika menghasilkan keuntungan sebesar Rp 300.000.000,- dan memiliki kekayaan atau kekayaan bersih paling sedikit Rp 50.000.000,- kriteria dalam UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh suatu organisasi, organisasi atau badan usaha atau perseorangan.

b) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan berdaya guna yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari usaha yang dimiliki, dikuasai atau sebagian dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha menengah atau besar. kriteria usaha kecil dalam pengertian undang-undang. Bisnis kecil adalah bisnis dengan sedikit pendapatan atau laba. Keuntungan dari penjualan kategori usaha kecil berkisar antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.

c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau perusahaan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diharuskan oleh hukum. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang dioperasikan oleh satu orang, organisasi atau kelompok sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Untuk memenuhi syarat sebagai usaha

menengah, ada dua karakteristik. Pertama, perusahaan menengah memiliki keuntungan Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000 dalam setahun. Sedangkan kekayaan bersih perusahaan menengah adalah Rp 500.000.000 dalam setahun.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva suatu organisasi atau penurunan kewajiban-kewajiban selama suatu periode akuntansi, terutama berasal dari aktiva operasi. Pendapatan juga dikatakan sebagai penghasilan yang timbul dari perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa (Hadi dan Hastuti, 2015:495).

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Diana dan Setiawati, 2017:361).

5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (1), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Pasal 2 Ayat (1), kesejahteraan adalah tatanan kehidupan dan kehidupan sosial jasmani dan rohani yang dikelilingi oleh rasa aman moral dan kedamaian lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dan

kedamaian batin ke dalam dan ke luar, memungkinkan setiap warga berusaha untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan spiritualnya. Kebutuhan sosial adalah yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia menurut Pancasila.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam “*Economic Development*” telah menjelaskan bahwa kebahagiaan masyarakat berarti suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang diterjemahkan menjadi perumahan yang layak, sandang (pakaian yang memadai) dan pangan, pendidikan, serta kesehatan. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana seseorang dapat memaksimalkan keuntungannya dalam batas anggaran tertentu dan keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.

6. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, beberapa hal yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat adalah:

a) Pendapatan Masyarakat

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila jumlah pendapatan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan lainnya. Masyarakat juga dapat dikatakan sejahtera jika terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial.

b) Pendidikan

Terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan dengan didukung oleh fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan taraf kesejahteraan hidup yang baik.

c) Kesehatan

Terjaminnya kualitas kesehatan yang baik dengan dukungan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke PT. PNM Mekar Cabang Wonokromo beberapa nasabah PNM Mekar Cabang Wonokromo guna mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014), pengertian dari fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan dan dampak dari adanya program PNM Mekar di Desa Darmokali.

3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar cabang Kecamatan Wonokromo. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang terdapat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar sehingga diharapkan dapat memberikan datayang lebih valid tentang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar terhadap pendapatan warga Desa Darmokali dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi PNM Mekar di Desa Darmokali

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan diketahui bahwa program PNM Mekar yang merupakan program pemerintah di ajukan kepada ibu rumah tangga produktif yang ingin menjalankan usaha baik yang ingin memulai maupun melanjutkan usaha dengan mengajukan kredit pinjaman ke PNM Mekar. Untuk itu penelitian ini mengkaji tentang evaluasi kebijakan PNM MEKAR dengan menggunakan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang selanjutnya akan ditelaah menggunakan menggunakan teori William N. Dunn.

William N. Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

a) Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Untuk mengevaluasi aspek efektivitas peneliti akan melakukan wawancara mengenai dua aspek yaitu kemanfaatan dan penolakan.

Berdasarkan 2 aspek tersebut serta kriteria efektifitas dalam kebijakan mengukur apakah suatu alternatif dapat berjalan dengan baik atau mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa bantuan permodalan PNM Mekar berjalan dengan efektif. Karena banyak nasabah yang terbantu dengan adanya permodalan tersebut, sekalipun untuk mengembangkan usaha atau tidak. Maka dapat dilihat bahwa program PNM Mekar telah berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh William Dunn (2003:608-610).

b) Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Dalam kriteria efisiensi, salah satu cara PNM Mekar menuangkan tujuannya dalam kebijakan ialah dengan menerapkannya pada proses mekanisme pembayaran serta sistem pengelompokan nasabah.

Dengan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kriteria efisiensi yang disampaikan William Dunn yaitu memiliki ongkos moneter yang minimum dan penerapan yang mudah, maka dapat dilihat bahwa PNM Mekar mampu menjalankan program permodalan dengan efisien sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh William Dunn (2003:608-610).

c) Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam aspek kecukupan, berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan serta solusi yang dilakukan oleh nasabah PNM Mekar adalah memilih pinjaman diluar program, maka dapat disimpulkan bahwa program PNM Mekar tidak dapat memenuhi aspek kecukupan yang sesuai dengan kriteria milik William Dunn. Namun, hal ini tidak menjadi kesimpulan akhir, perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari pilihan nasabah ini, serta menyusun solusi yang tepat agar program PNM Mekar dapat lebih relevan. Maka dapat dilihat bahwa PNM Mekar memiliki permasalahan yang

telah terpecahkan sesuai dengan teori menurut Mark, et.al (2000:13).

d) Pemerataan

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk padadistribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Dalam hal ini penulis menguraikannya ke dalam 2 bagian sesuai dengan temuan fakta di lapangan, antara lain pendistribusian pinjaman dan keberlanjutan usaha.

Dengan merancang pendistribusian pinjaman yang berdasarkan analisis kemampuan dan kebutuhan usaha nasabah serta mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan keadilan dalam pembagian sumber daya. Program permodalan PNM Mekar telah berhasil mencapai tujuan pemerataan sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh William Dunn (2003: 608-610).

e) Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Meskipun tidak akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak. Dalam konteks PNM Mekar, kelompok-kelompok yang terlibat dalam kerangka responsivitas adalah nasabah-nasabahprogram permodalan ini. Bagi nasabah-nasabah PNM Mekar,

keikutsertaan mereka dalam program ini dikarenakan keinginan untuk mengubah kondisi ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mereka melihat program permodalan ini sebagai peluang untuk memperoleh akses terhadap modal usaha yang sebelumnya sulit merekadapatkan.

Mengacu pada hal ini, penulis membagi respon kebijakan menjadi dua yaitu respon terhadap manfaat program permodalan dan respon terhadap pelayanan karyawan PNM Mekar. Dalam hal ini, kebijakan permodalan PNM Mekar mendapat respon yang sangat baik. Untuk itu, peneliti berpendapat bahwa respon dari setiap yang terlibat dalam kebijakan sudah bagus hanya saja ada beberapa hal yang harus di lengkapi oleh para pembuat kebijakan yaitu memperhatikan setiap kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa PNM Mekar telah memiliki responsivitas yang baik sesuai dengan kriteria evaluasi menurut William N Dunn (2003:608-610).

f) Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama- sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi dua penjabaran yang sesuai dengan fakta temuan di lapangan yaitu kebijakan untuk memenuhi aspek ketepatan dan penyimpangan.

Dalam konteks ketepatan, terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan serta kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekar dengan kenyataan yang terjadi di Desa

Darmokali. Tujuan awal dari kebijakan ini adalah membantu perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Namun, dalam praktiknya di Desa Darmokali, mayoritas nasabahnya adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha. Tujuan mereka bergabung dengan program ini hanya untuk membantu perekonomian keluarga mereka secara umum.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PNM Mekar tidak mencapai tingkat ketepatan yang diharapkan dalam hal sasaran populasi yang dituju. Namun, perlu dicatat bahwa dalam aspek ketepatan lainnya, seperti jangka waktu pembayaran, tingkat bunga yang tetap, dan sistem ‘tanggung renteng’ yang belum pernah terjadi, kebijakan PNM Mekar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan ketepatan kebijakan ini agar sesuai dengan tujuan awalnya yaitu membantu ibu-ibu prasejahtera yang ingin membangun usaha mereka agar lebih maju.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dilihat bahwa PNM Mekar tidak sesuai dengan kriteria ketepatan menurut William N. Dunn namun sesuai dengan teori evaluasi menurut Mark, et.al. (2000:13) yang ke 3 yaitu kekeliruan dan kesesuaian (*oversight and compliance*).

2. Dampak Terhadap Pendapatan

Program PNM Mekar memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan warga lokal di Kecamatan Wonokromo, Desa Darmokali. Namun perlu dicatat bahwa temuan fakta di lapangan, beberapa nasabah PNM Mekar tidak memiliki usaha. Hal ini menyebabkan peneliti tidak dapat mengukur pendapatan sebelum dan sesudah bergabung dalam program permodalan.

Tabel 4.1. Daftar Pendapatan Nasabah PT PNM Mekar di Desa Darmokali

No	Nama	Sebelum Mengikuti Permodalan	Setelah Mengikuti Permodalan
1	Titik Sulistiyowati	Rp3.500.000	Rp5.000.000
2	Kasnikah	Rp2.000.000	Rp3.000.000
3	Anita Suhartanti	Rp2.500.000	Rp3.200.000
4	Yayuk	Rp2.200.000	Rp3.800.000
5	Rubiah	Rp1.800.000	Rp2.700.000
6	Subandiyah	Rp2.500.000	Rp3.500.000

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data pendapatan yang disajikan, terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada sejumlah nasabah program PNM Mekar. Misalnya, Titik Sulistiyowati mengalami peningkatan pendapatan dari Rp 3.500.000 menjadi Rp 5.000.000 setelah bergabung dengan program permodalan.

Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan ini antara lain adalah nasabah mampu menambah kuantitas dan variasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Serta dengan adanya modal tambahan, nasabah mampu melebarkan usahanya melalui toko *online* yang mana hal ini semakin memperluas jangkauan usaha nasabah, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Keduafaktor tersebut juga terjadi pada Kasnikah. Sedangkan Subandiyah, Yayuk, Anita Suhartanti, dan Rubiah yang dengan adanya permodalan mampu menambah variasi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen masing-masing.

Dalam konteks ini, dapat diketahui bahwa bagi pemilik usaha yang mengelola usahanya dengan bantuan permodalan dari program ini, terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program PNM Mekar berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan bagi pemilik usaha yang telah bergabung.

Sementara itu, bagi nasabah lainnya yang tidak memiliki usaha, program ini memberikan manfaat dalam aspek

pemenuhan kebutuhan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga mereka seperti pembiayaan pendidikan anak yang dilakukan oleh Ibu Deby, Ibu Martin, Ibu Risa serta pembiayaan kebutuhan harian yang dilakukan oleh mayoritas nasabah.

3. Dampak Terhadap Kesejahteraan

PNM Mekar yang bergerak di bidang pembiayaan mikro erat kaitannya dengan dampak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dalam hal ini, peneliti menggunakan indikator pendapatan masyarakat sebagai tolak ukur yang tepat untuk dapat melihat dampak kebijakan PNM Mekar pada kesejahteraan masyarakat.

a) Peningkatan Pendapatan

Program PNM Mekar memberikan manfaat yang signifikan berupa peningkatan pendapatan bagi nasabah. Nasabah yang memiliki usaha dapat mengembangkan usaha mereka dengan bantuan permodalan sehingga pendapatan mereka meningkat. Sementara itu, nasabah yang sebelumnya tidak memiliki usaha juga dapat memanfaatkan bantuan permodalan untuk memulai usaha baru, yang berpotensi meningkatkan pendapatan mereka.

b) Kemudahan Pembayaran Pinjaman

Program PNM Mekar dengan kebijakan bunga flat sebesar 5% dan jangka waktu pembayaran sekali dalam seminggu memberikan kemudahan dalam pembayaran pinjaman bagi nasabah. Hal ini mengurangi beban finansial nasabah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pada indikator kelompok yang solid dan mendukung. Program PNM Mekar memilih kelompok nasabah yang kompak, solid, dan saling mendukung. Dalam lingkungan kelompok yang harmonis ini, belum pernah ada 'tanggung renteng' yang terjadi di Desa Darmokali. Keberhasilan dalam membentuk kelompok yang solid mencerminkan keberhasilan program dalam

menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang setara dan meminimalisir adanya kecemburuan sosial.

Melalui indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa program PNM Mekar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan warga lokal di Kecamatan Wonokromo, Desa Darmokali. Kemudahan dalam pembayaran pinjaman dan peningkatan pendapatan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah, sementara kelompok yang solid menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang setara dan meminimalisir adanya kecemburuan sosial. Program ini memberikan rasa aman, nyaman, dan memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan esensi dari evaluasi menurut buku SANKRI (LAN, 2005:131).

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya evaluasi kebijakan program PNM Mekar di Desa Darmokali berjalan sudah berjalan dengan baik. Untuk itu ada beberapa kesimpulan dari peneliti dari evaluasi kebijakan PNM Mekar sebagai berikut:

- a) Pada evaluasi kebijakan PNM Mekar di Desa Darmokali dapat ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dun. Program PNM Mekar pada kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan pemerataan sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan PNM Mekar. Namun pada kriteria kecukupan dan ketepatan belum berjalan dengan baik karena ada beberapa penyimpangan yang terjadi di Desa Darmokali.
- b) Pada aspek dampak, peneliti beranggapan bahwa sudah berjalan sangat baik. Hal ini dikarenakan para nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan

permodalan yang diberikan oleh PT PNM melalui program Mekar tersebut. Hal tersebut terlihat dari perkembangan usaha mulai dari variasi produk hingga laba penjualan yang meningkat, yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan nasabah PNM Mekar di Desa Darmokali.

2. Rekomendasi

Dalam penelitiannya, peneliti mencoba memberikan beberapa saran dan masukan agar pelaksanaan program Mekar bisa berjalan lebih baik lagi yaitu diantaranya:

- a) Untuk evaluasi program PNM Mekar, diharapkan pihak PNM Mekar dapat lebih teliti dalam melakukan survey lapangan, agar dapat mengetahui validitas adanya usaha atau tidak serta pertahankan kualitas pelayanan terhadap nasabah yang melakukan pengkreditan di PNM Mekar cabang Wonokromo. Untuk nasabah, diharapkan agar selalu menaati aturan yang ada sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b) Untuk meningkatkan dampak program PNM Mekar, disarankan untuk

melakukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada nasabah sehingga tujuan program dapat tercapai dengan maksimal.

REFERENSI

- Kumar, R. (2011). *Research Methodology: A Step By-Step Guide For Beginners*. London: Sage.
- Mardiana, A. (2019). Evaluasi, Perubahan dan Terminasi Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 1–16.
- Mardikanto. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 121–136.
- Mustopadidjaja, A. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Sandri, L. A. (2005). *Landasan dan Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: LAN.